

Hutang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Faishol Luthfi

Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga
ishol2107@gmail.com

Abstract

There are so many interesting phenopenone if we discuss of Indonesian economy especially at monetary sector. Foreign debt is one of several popular problem on developing countries like Indonesia. It is one of practice solution about saving debt to maintain the development process. The aim of this research is to analyse Indonesian foreign debt and How Islamic perspective views it. Analytical method used in this research is literature study. We used secondary data taken from BI, BPS, Kemenkeu, etc. The result of this research shows that foreign debt will be a boomerang when not properly managed by the government. In some cases, Indonesia's current foreign debt conditions do not conform to the norms taught by Islam. The implication is that the government needs a re-review of foreign debt to be more in line with Islamic norms which put forward the side of maslahat

Keywords: Foreign debt, Islamic Perspective

Pendahuluan

Proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat bangsa merupakan bagian dari tahapan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya dilakukan dengan berbekal tekad yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi lebih dari itu harus didukung pula oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam; sumberdaya manusia; dan sumberdaya modal, yang produktif. Dengan kata lain, tanpa adanya daya dukung yang cukup kuat dari sumberdaya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Adapun kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi ini oleh negara-negara dunia ketiga tidaklah sama. Ada negara yang memiliki kelimpahan pada jenis sumberdaya ekonomi tertentu, ada pula yang kekurangan. (Atmadja, 2000)

Pada banyak negara dunia ketiga, yang umumnya memiliki tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah, mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi memang sangat mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara industri maju. Oleh karena

masih relatif lemahnya kemampuan partisipasi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi, mengharuskan pemerintah untuk mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. (Atmadja, 2000)

Seolah-olah segala upaya dan strategi pembangunan difokuskan oleh pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga, seringkali hal tersebut dilakukan melebihi kemampuan dan daya dukung sumberdaya ekonomi di dalam negeri yang tersedia pada waktu itu. Akibatnya, pemerintah negara-negara tersebut harus mendatangkan sumberdaya ekonomi dari negara-negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasionalnya.

Sumber daya modal merupakan sumberdaya ekonomi yang paling sering didatangkan oleh pemerintah negara-negara sedang berkembang untuk mendukung pembangunan nasionalnya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sumberdaya modal dalam negeri. Sumber daya modal yang didatangkan dari luar negeri, yang umumnya dari negara-negara industri maju, ini wujudnya bisa beragam, seperti penanaman modal asing (*direct investment*), berbagai bentuk investasi portofolio (*portfolio investment*) dan pinjaman luar negeri. Dan, tidak semuanya diberikan sebagai bantuan yang sifatnya cuma-cuma (gratis), tetapi dengan berbagai konsekuensi baik yang bersifat komersial maupun politis.

Keberadaan pinjaman luar negeri (hutang luar negeri) hampir tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan negara-negara berkembang. Negara berkembang seperti halnya Indonesia, hutang digunakan untuk mengatasi kesenjangan tabungan (*gap saving*) yaitu lebih kecilnya nilai tabungan dibandingkan dengan nilai investasi. Perubahan orientasi politik dari orde lama yang menempatkan politik sebagai panglima ke pemerintahan orde baru yang berorientasi pada pembangunan ekonomi membawa perubahan strategi pembangunan ekonomi. Secara teoritis hutang luar negeri dapat dibenarkan untuk menutup kelangkaan dana pembangunan *domestic* yang diharapkan dengan pengelolaan dana secara hati-hati (*prudential*) dan terarah dapat digunakan untuk membangun proyek-proyek pembangunan yang hasilnya untuk membayar cicilan hutang dan bunganya. Persoalan hutang luar negeri kemudian menjadi persoalan serius setelah secara akumulatif jumlahnya semakin membengkak dan memberatkan anggaran negara. Beban pembayaran pokok dan bunga hutang luar

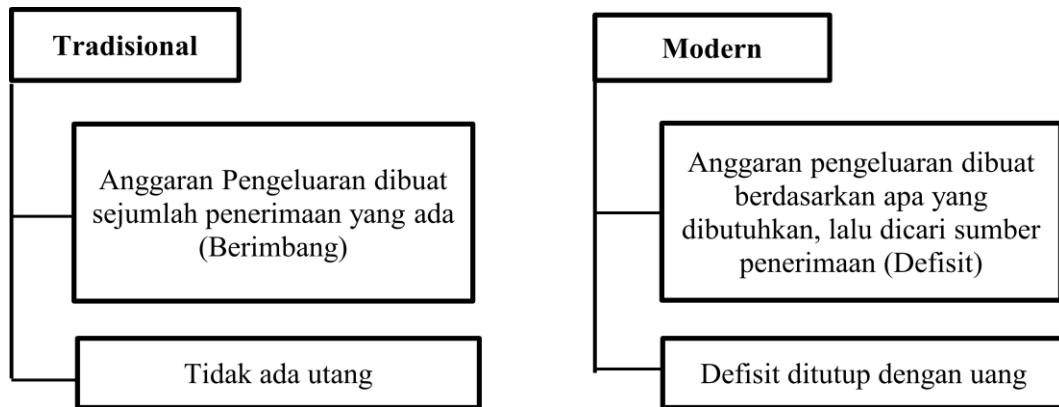
negeri yang semakin besar menyurutkan peran pemerintah untuk lebih mengarahkan anggaran negara bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Hutang luar negeri yang skenario awalnya hanya sekedar sebagai pelengkap dana pembangunan sekarang menjadi beban pembangunan itu sendiri. (Yuliadi, 2007)

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hutang

Hutang dalam bahasa arab adalah *ad Dayn* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan) sehingga hutang negara adalah milik rakyat dan digunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, *ad Dayn* secara bahasa juga dapat bermakna pinjaman. (Aziz dan Ramdansyah, 2016).

Hutang dalam lingkup kebijakan keuangan negara dibagi menjadi dua, yaitu hutang negara/pemerintah dan hutang swasta. Hutang pemerintah adalah pinjaman yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (*public debt*), sedangkan hutang swasta adalah pinjaman pihak swasta, baik perorangan maupun perseroan.



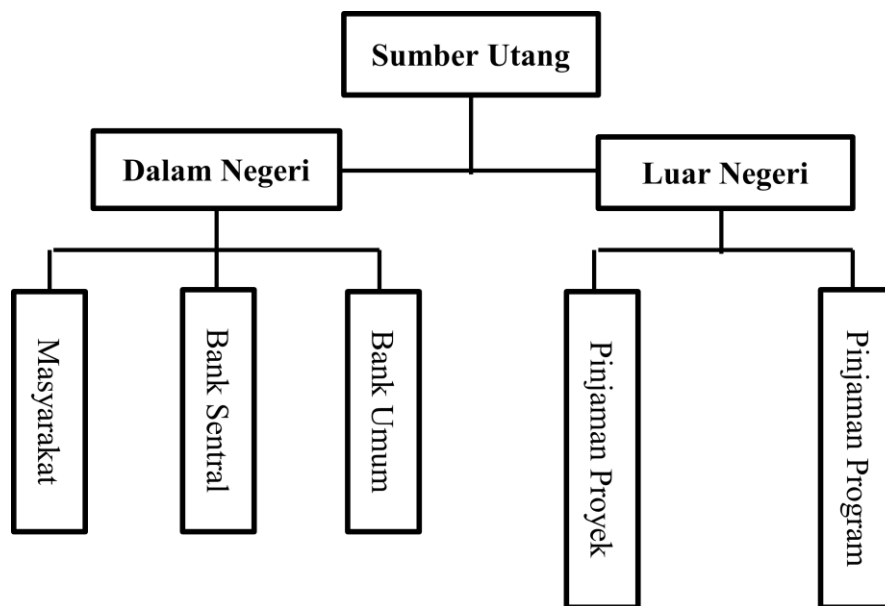
Sumber: Huda (2016)

Gambar 2.1 Munculnya Hutang Negara

Keuangan negara kebanyakan menganut sistem *budget deficit*. Untuk mengatasi *budget deficit* yang biasa dilakukan ialah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan atau meminjam dana baik dari masyarakat atau pihak lain melalui obligasi atau hutang luar negeri. Tentu hal ini berbeda dengan sistem awal pemerintahan Islam yang lebih menggunakan sistem tradisional. Konsep ini tidak serumit sistem anggaran modern sehingga secara sederhana konsep ini adalah konsep berimbang dalam pengertian pengeluaran dan

penerimaan negara adalah sama. Pada era pemerintahan Rasulullah dan khulafaurrasyidin, APBN jarang sekali mengalami *budget deficit*. Hal ini dikarenakan para pemimpin memegang prinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan. Hanya terjadi sekali *budget deficit* yaitu sebelum Perang Hunain, sebelum *Fathu Makkah* karena banyak orang masuk Islam sehingga pengeluaran zakat lebih besar dari penerimaannya. Hhutang tersebut segera dilunasi setelah perang (setahun kemudian). (Huda, 2016)

Di era sekarang, masalah defisit anggaran dihadapkan pada pilihan menutupinya dengan mengandalkan instrumen pembiayaan, baik dari dalam atau luar negeri. Berikut ini adalah sumber pembiayaan negara menurut Huda (2016):



Sumber: Huda, (2016)

Gambar 2.2 Sumber Hutang Negara

Pandangan Terhadap Hutang Negara Dalam Perspektif Islam

Secara umum terdapat dua pandangan terkait hutang negara dalam perspektif ekonomi Islam:

Tabel 2.1
Pandangan Islam Terhadap Hutang Negara

Pro hutang (<i>external financing</i>)	Kontra hutang (<i>external financing</i>)
Boleh sepanjang bentuk dan mekanisme sesuai dengan syariat	Tidak boleh menutup <i>budget deficit</i> dengan hhutang luar negeri.
Latar belakang:	Latar belakang:

<p>Konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan.</p> <p>Bentuk kerjasama dalam Islam seperti <i>murabahah, mudharabah, musyarakah</i> dapat dikembangkan sebagai <i>external financing</i> dan juga bentuk-bentuk ini lebih ke arah <i>flow creating equity</i></p>	<p>Tendensinya ke arah faktual dan preventif, dimana keterlibatan negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan bersentuhan dengan riba.</p>
---	--

Sumber: Huda (2016), diolah

2. Hutang Luar Negeri

Menurut definisi yang dirumuskan *Development Assistance Committee* (2002) hutang luar negeri adalah bantuan pembangunan secara resmi yang terdiri dari dana yang disediakan oleh pemerintah atas persyaratan konsesional terutama untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang. Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Setiawan (2011).

Menurut Setiawan (2011) hutang luar negeri Indonesia terdiri dari:

1. Hutang luar negeri pemerintah

Hutang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari hutang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing, dan SBN (Surat Berharga Negara) baik yang diterbitkan di luar negeri maupun di dalam negeri yang bukan dimiliki oleh penduduk.

2. Hutang luar negeri bank swasta

Hutang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu ada juga hutang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia.

3. Hutang luar negeri swasta

Hutang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valas dan atau rupiah Indonesia berdasarkan perjanjian hutang (*loan agreement*) atau

perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.

Motif hutang luar negeri menurut Setiawan (2011) adalah

1. Kurangnya tabungan dalam negeri (*saving investment gap*).

Kelurahan tabungan ini tidak lain karena rendahnya tingkat pendapatan penduduk, di samping itu juga karena sistem keuangan yang belum memadai

2. Kurangnya kemampuan untuk menghasilkan devisa (*foreign exchange gap*).

Untuk melakukan transaksi perdagangan internasional diperlukan devisa, sementara itu kemampuan dalam menghasilkan devisa masih rendah.

Indikator beban luar negeri menurut Setiawan (2011) ada tiga yaitu:

1. DSR (*Debt Service Ratio*)

Rasio pembayaran hutang terhadap ekspor bersih adalah perbandingan antara pembayaran bunga dan cicilan hutang terhadap penerimaan ekspor bersih.

$$DSR = \frac{B + Cu}{Xn} \times 100 \%$$

Di mana:

DSR = *Debt Service Ratio*

B + Cu = Pembayaran bunga dan cicilan hutang

Xn = Ekspor bersih

< 20% = Ambang batas aman

2. DER (*Debt Export Ratio*)

Rasio total hutang terhadap ekspor bersih adalah perbandingan antara total hutang luar negeri terhadap penerimaan ekspor bersih.

$$DER = \frac{TULN}{Xn} \times 100 \%$$

Di mana:

DER = *Debt Export Ratio*

TULN = Total hutang luar negeri

Xn = Ekspor bersih

< 200% = Ambang batas aman

3. DGNP (*Debt to GNP Ratio*)

Rasio total hutang terhadap GNP adalah perbandingan antara total hutang luar negeri (kumulatif) terhadap produk nasional bruto.

$$DGNP = \frac{TULN}{GNP} \times 100 \%$$

Di mana:

DER	= Debt to GNP Ratio
TULN	= Total hutang luar negeri
Xn	= Produk Nasional Bruto
< 40%	= Ambang batas aman

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kepustakaan dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Model penelitiannya adalah postulasi, yakni penelitian yang membandingkan antara konsep teori yang sudah ada dengan kenyataan di lapangan, sehingga bisa diketahui akar masalah, sekaligus solusi yang bisa diambil ketika akar masalah yang ada telah ditemukan (Harahap, 2014)

Pembahasan

Pertumbuhan hutang luar negeri Indonesia fluktuatif dari tahun 2004-2016. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 4.1. Jika dilihat secara jumlah, hutang luar negeri Indonesia fluktuatif tetapi trennya meningkat, mulai dari tahun 2004 yang hanya \$141,27 miliar menjadi \$317,09 miliar di tahun 2016.

Gambar 4.1
Pertumbuhan Total Hutang Luar Negeri Indonesia 2004-2016



Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com

Gambar 4.2 menjelaskan bahwa sejak 2012 proporsi hutang swasta lebih tinggi dibandingkan pemerintah dan bank sentral. Pada 2004, hutang luar negeri swasta tercatat berjumlah \$57,98 miliar atas 41,04 persen dari total hutang luar negeri. Nilainya meningkat mencapai \$158,8 miliar pada 2016 atau setara dengan 50,08 persen terhadap total hutang.

Gambar 4.2
Pertumbuhan Hutang Luar Negeri Swasta Indonesia 2004-2016



Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com

Pada periode 2004 hingga 2016, pertumbuhan hutang swasta tertinggi terjadi di 2011, sebesar 27,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya di mana

nilai hutang luar negeri bertambah dari \$83,79 miliar di 2010 menjadi \$106,73 miliar di 2011.

Proporsi hutang luar negeri pemerintah terhadap total hutang sejak 2012 hingga 2016 memperlihatkan tren yang menurun dibandingkan swasta. Begitu pula dengan hutang luar negeri Bank Sentral yang juga memperlihatkan tren proporsi yang menurun. Pada 2012, proporsi hutang Pemerintah dan Bank Sentral masing-masing sebesar 46,04 persen dan 3,94 persen terhadap total hutang luar negeri. Proporsinya menurun menjadi 48,84 persen untuk pemerintah dan 1,07 persen untuk Bank Sentral pada 2016.

Gambar 4.3
Pertumbuhan Hutang Luar Negeri Indonesia 2004-2016 (Pemerintah dan Bank Sentral)



Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com

Meskipun proporsinya menurun, tapi hutang luar negeri pemerintah tumbuh positif. Pada periode 2004 hingga 2016, hutang luar negeri pemerintah tumbuh paling tinggi pada 2010, sebesar 17,62 persen dari \$90,85 miliar di 2009 menjadi \$106,86 miliar di 2010. Pada periode 2014 hingga 2016, per tahunnya, rata-rata pertumbuhan hutang luar negeri pemerintah sebesar 10,67 persen. Pada 2014, nilai hutang luar negeri pemerintah tercatat sebesar \$123,81 miliar dan meningkat menjadi \$154,88 miliar pada 2016.

Di sisi lain, nilai hutang luar negeri Bank Sentral menunjukkan tren yang menurun. Pada 2004, nilai hutang luar negeri Bank Sentral sebesar \$12,64 miliar dan menurun menjadi \$3,41 miliar pada 2016. Berdasarkan sektor ekonomi, sejak 2004 hingga 2016, proporsi terbesar hutang luar negeri Indonesia berada pada

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada 2016, hutang luar negeri Indonesia yang terkonsentrasi pada sektor ini mencapai \$165,74 miliar. Sedangkan, sektor dengan proporsi hutang luar negeri terendah pada 2016 adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan nilai \$7,7 miliar.

**Gambar 4.4 Hutang Luar Negeri Indonesia 2004-2016
(Berdasarkan Sektor Ekonomi)**



Sumber: Bank Indonesia dari www.tirtoid.com

Dilihat dari kelompok peminjamnya, pada 2016, hutang luar negeri pemerintah maupun swasta terkonsentrasi terbesar pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Melihat tren dari hutang luar negeri pemerintah, wajar jika timbul kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah dalam mengelola hutangnya. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya melihat potensi sektor-sektor riil seperti pertanian, perikanan, maupun sektor pariwisata. Tetapi jika dilihat dari perkembangan hutang luar negeri seperti pada gambar 4.4 justru keuangan, persewaan, jasa perusahaan mendominasi.

Tabel 4.2
Posisi Hutang Luar Negeri Menurut Kreditor Tahun 2010-Juni 2017 (Juta USD)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016						2017					
							Jul*	Aug*	Sep*	Oct*	Nov*	Des*	Jan*	Feb*	Mar*	Apr*	May*	Jun**
1. Negara Pemberi Pinjaman / Creditor's Country	118.272	140.477	153.555	163.122	176.826	178.281	177.957	176.749	176.833	175.966	172.402	169.144	170.415	171.021	170.672	171.653	175.077	173.908
<i>Amerika / USA</i>	5.598	8.008	10.718	10.102	11.663	10.267	10.541	10.514	10.300	10.380	10.707	10.561	10.521	11.071	11.092	11.160	12.704	12.801
<i>Australia</i>	1.398	1.609	1.463	1.270	1.328	1.394	1.520	1.537	1.555	1.630	1.616	1.535	1.512	1.507	1.457	1.458	1.458	1.452
<i>Austria</i>	1.279	1.136	1.045	1.032	812	619	579	554	560	511	518	522	484	475	495	514	511	495
<i>Belanda / Netherland</i>	15.372	13.509	13.982	13.116	11.705	11.001	10.107	10.082	9.908	9.366	9.132	8.906	9.056	9.059	9.039	8.856	8.674	8.134
<i>Belgia / Belgium</i>	621	746	969	1.024	869	830	851	846	823	796	720	657	663	653	603	602	606	602
<i>Hongkong</i>	2.060	2.802	3.955	4.820	6.725	7.886	8.421	8.467	8.337	8.324	8.475	12.110	12.108	12.088	12.152	12.089	12.046	11.757
<i>Inggris / United Kingdom</i>	3.096	2.931	3.109	4.641	5.491	4.510	3.644	3.620	3.442	3.403	3.310	3.348	3.435	3.518	3.697	3.711	3.839	3.664
<i>Jepang / Japan</i>	40.473	43.774	40.026	32.826	30.463	31.357	33.523	33.537	33.807	33.015	31.346	30.254	30.628	30.731	30.570	30.878	30.774	30.445
<i>Jerman / Germany</i>	3.604	3.658	3.577	3.388	3.225	3.489	3.527	3.468	3.397	3.367	3.570	3.806	3.453	3.437	3.460	3.470	3.495	3.449
<i>Korea Selatan / South Korea</i>	1.624	1.855	3.089	4.841	5.747	6.232	6.201	6.182	6.191	6.148	6.186	6.116	6.196	6.299	6.330	6.381	6.364	6.365
<i>Perancis / France</i>	3.056	2.747	3.126	3.062	3.164	3.033	3.167	3.172	3.168	3.219	3.172	3.236	3.275	3.247	3.188	3.159	3.150	3.339
<i>Singapura / Singapore</i>	24.724	38.497	42.288	49.830	60.454	58.198	55.539	54.363	54.497	54.892	52.933	50.977	51.566	51.341	50.709	51.233	52.557	52.412
<i>Spanyol / Spain</i>	500	469	445	421	383	446	459	467	468	466	460	463	464	474	539	543	544	491
<i>Swiss / Switzerland</i>	968	1.133	1.193	1.586	1.264	996	1.227	1.233	1.241	1.304	1.357	1.343	1.383	1.407	1.472	1.549	1.588	1.509
<i>Tiongkok / China</i>	2.488	3.701	5.060	6.158	7.869	13.660	14.167	14.223	14.247	14.336	14.324	14.857	14.818	14.813	15.028	15.227	15.506	15.572

Sumber: SULNI, volume VIII Agustus 2017

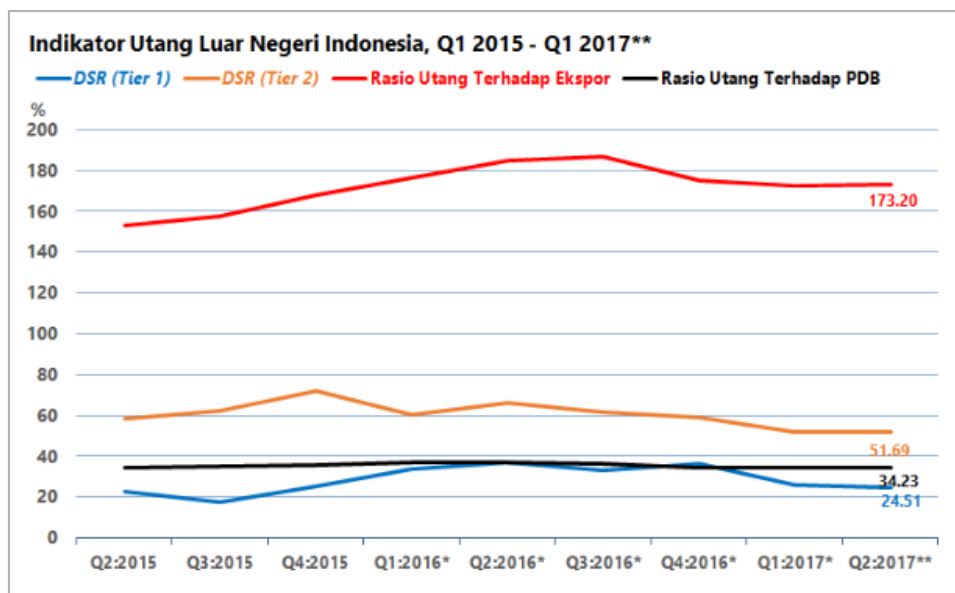
Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa negara-negara pemberi pinjaman yang terbesar adalah negara-negara yang mana bukan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini lah yang mungkin menyebabkan beberapa ekonom Muslim menyatakan kontra terkait dengan hutang (*external financing*). Beberapa golongan kontra tersebut tendensinya ke arah kekhawatiran jika bersentuhan dengan riba. Misalnya saja Jepang sebagai negara pemberi hutang terbesar tetap menetapkan sistem bunga yang mana riba dengan tingkat bunga 0,1% seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia:

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jepang menyalurkan pinjaman untuk proyek infrastruktur Indonesia dengan nilai maksimal 127,21 miliar yen atau setara dengan Rp15,18 triliun. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga sangat kecil, yakni hanya 0,1 persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman hingga 40 tahun.

(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171113165235-78-255342/jepang-kururkan-pinjaman-rp152-t-bunga-cuma-01-persen>, diakses pada 5 Mei 2018)

Bagaimana kondisi hutang luar negeri Indonesia dilihat dari indikator-indikatornya ?. Di bawah ini adalah kondisi indikator hutang luar negeri Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2017:

Gambar 4.5
Indikator-Indikator Hutang Luar Negeri (persen)



Sumber: Macroeconomic Dashboard FEB UGM 2017, Bank Indonesia 2017

Keterangan:

DSR Tier 1 merupakan pembayaran pokok dan bunga atas hutang jangka panjang dan pembayaran bunga atas hutang jangka pendek.

DSR Tier 2 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas hutang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan hutang dagang kepada non-afiliasi.

Gambar 4.5 di atas menjelaskan bahwa angka DSR mengalami fluktuasi tetapi trennya masih tergolong tinggi yang mana secara teori $< 20\%$ sedangkan dari data di atas menunjukkan bahwa fluktuasi angka masih berada di kisaran lebih dari 20% . Hal ini tentu menjadi rambu-rambu bagi Indonesia.

Menurut Beik (2009) dalam Huda (2016) hutang mempunyai prinsip tertentu yaitu:

1. Hutang merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kemandekan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Dalam konteks negara, maka apakah kebijakan hutang yang telah dilakukan pemerintah Indonesia telah memenuhi unsur keterpaksaan atau justru menjadi kebiasaan.
2. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terlilit hutang. Hal ini akan menimbulkan efek yang besar yaitu *qahrir rijal*. Atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang akan menyebabkan harga diri menjadi hilang. Apalagi, jika yang mengendalikan adalah musuh yang mempunyai niat buruk dan kebencian luar biasa. Dalam konteks negara harus dilihat apakah selama ini sudah sesuai dengan kemampuan bangsa.
3. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Dalam konteks makro, terkait dengan hubungan antar negara jika Indonesia berusaha melakukan upaya *rescheduling* hutang atau bahkan penghapusan hutang maka upaya tersebut adalah hal yang sah-sah saja apalagi ternyata manfaat hutang Indonesia selama ini lebih banyak dinikmati asing. Ekonom Drajad H. Wibowo mengatakan bahwa 70% manfaat hutang kembali ke kreditur.

Secara sederhana, dari beberapa data di atas, jika dikorelasikan dengan prinsip hutang, bahwasanya dengan adanya prinsip keterpaksaan dalam konsep hutang dalam Islam, maka pemerintah Indonesia harusnya hati-hati dan jangan

berhutang diluar kemampuan. Implikasinya seharusnya indikator-indikator hutang luar negeri akan terjaga dan akan berada dalam tahap ambang batas aman.

Negara-negara pemberi pinjaman terbesar seperti Jepang, Singapura, Tiongkok dapat berpotensi mengendalikan Indonesia apalagi jika hutang tidak dikelola dengan baik dan Indonesia berada dalam *ghalabatid dayn*.

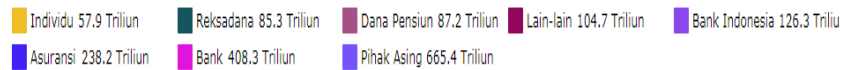
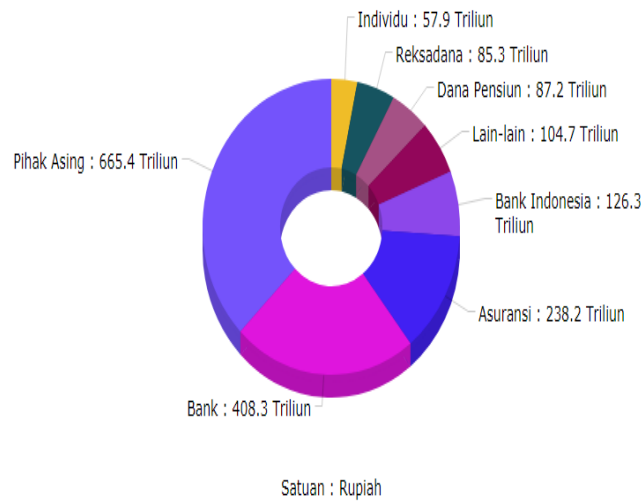
Tabel 4.2
Posisi Hutang Luar Negeri Menurut Pemerintah dan Bank Sentral Menurut Jenis Hutang Tahun 2010-Juni 2017
(Juta USD)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016						2017					
							Jul*	Aug*	Sep*	Oct*	Nov*	Dec*	Jan*	Feb*	Mar*	Apr*	May*	Jun**
1. Pemerintah / Government	106.860	112.427	116.187	114.294	123.806	137.396	154.384	155.188	158.259	155.946	150.958	154.875	157.247	158.166	162.367	163.886	164.399	166.278
- Bilateral	35.614	35.722	32.007	27.134	23.096	21.556	22.939	23.112	23.285	22.420	21.465	20.847	21.384	21.374	21.288	21.324	21.038	20.982
- Multilateral	23.129	23.363	23.752	23.598	23.473	26.094	26.293	26.961	27.313	27.168	26.985	27.499	27.341	27.835	27.839	27.633	27.557	27.579
- Fasilitas kredit ekspor / <i>Export credit facility</i>	8.775	8.098	6.989	6.023	4.972	3.971	3.575	3.567	3.553	3.466	3.398	3.205	3.201	3.198	3.183	3.157	3.064	3.036
- Komersial / <i>Commercial</i>	581	639	594	1.517	2.381	2.605	2.703	2.702	2.696	2.666	2.661	2.638	2.647	2.662	2.710	2.632	2.649	2.598
- Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBN Internasional / <i>International Government Securities</i>	16.989	20.028	24.869	29.453	32.797	42.682	48.544	48.614	48.713	48.457	48.079	51.133	51.300	51.259	53.056	53.176	53.328	54.229
SBN Domestik / <i>Domestic Government Securities</i>	21.772	24.576	27.975	26.567	37.086	40.487	50.331	50.233	52.699	51.769	48.371	49.554	51.376	51.839	54.292	55.963	56.764	57.854

Sumber: SULNI, volume VIII Agustus 2017

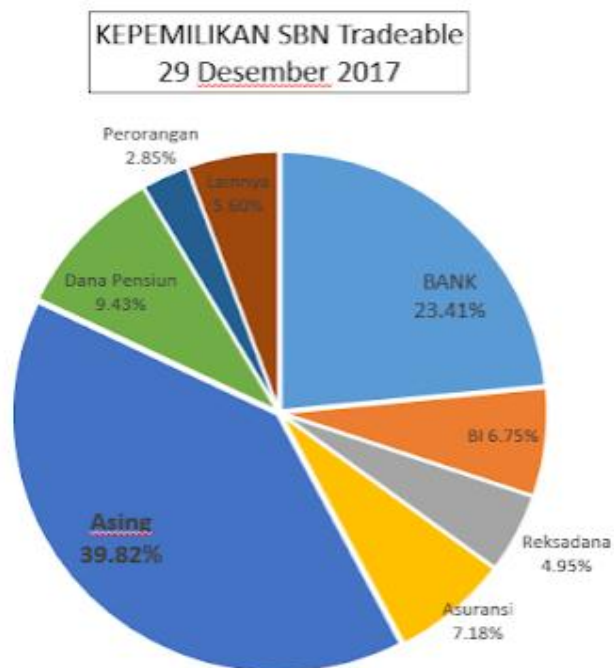
Tabel 4.2 menjelaskan bahwasanya hutang luar negeri didominasi pada SBN (Surat Berharga Negara). Kenaikannya pun sangat signifikan mulai dari tahun 2010 yang hanya 16.989 juta USD untuk SBN internasional dan 21.772 juta USD untuk SBN domestik hingga juni 2017 mencapai 54.229 juta USD untuk SBN internasional dan 57.854 juta USD untuk SBN domestik. Sedangkan porsi kepemilikan SBN adalah seperti pada gambar 4.2 dan 4.3 di bawah ini:

Porsi Kepemilikan Surat Berharga Negara



Sumber: DJPPR Kemenkeu 2016

Gambar 4.6: Porsi Kepemilikan Surat Berharga Negara tahun 2016



Sumber: DJPPR Kemenkeu edisi Agustus 2017

Gambar 4.7: Porsi Kepemilikan Surat Berharga Negara tahun 2017 (%)

Gambar 4.6 dan 4.7 menjelaskan bahwa porsi kepemilikan SBN sebagian besar adalah asing. Hal ini berimplikasi pada riskannya kondisi perekonomian

Indonesia yang disebabkan pola perilaku investor asing sebagai akibat dari naik turunnya suku bunga FED (*Federal Reserve System*) dan nilai tukar rupiah.

Secara sederhananya adalah ketika FED menaikkan suku bunga, maka investor-investor asing akan kembali ke Amerika sehingga terjadi *capital outflow*. Permintaan akan dollar Amerika meningkat sehingga dollar akan menguat dan nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami penurunan. Ketika rupiah melemah, kepemilikan asing terhadap SBN akan menurun dan investor akan menahan diri terhadap SBN. *Demand* dari SBN turun menyebabkan tingkat suku bunga dalam negeri naik. Efek dari kenaikan tingkat suku bunga tersebut adalah orang lebih senang untuk menyimpan uang mereka daripada sebagai investasi. Perekonomian akan melambat.

Menurut Susan George (1992) dalam Atmadja (2000), hutang luar negeri secara pragmatis justru menjadi bomerang bagi negara penerima (debitur). Perekonomian di negara-negara penerima hutang tidak menjadi semakin baik, melainkan bisa semakin hancur. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil penelitiannya yang menunjukkan, bahwa pada tahun 1980-an arus modal yang mengalir dari negara-negara industri maju, yang umumnya merupakan negara kreditur, ke negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan pembangunan (*official development assistance*), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); *portfolio investment*; pinjaman bank; dan kredit perdagangan (ekspor/impor), lebih kecil daripada arus aliran dana dari negara-negara yang sedang berkembang ke negara-negara maju tersebut dalam bentuk cicilan pokok hutang luar negeri dan bunganya, royalti, deviden, dan keuntungan repatriasi dari perusahaan-perusahaan negara maju yang berada di negara-negara yang sedang berkembang.

Penelitian Susan George ini memperkuat argumentasi yang pernah disampaikan G.J. Meier (1970), bahwa arus modal asing dari negara maju ke negara dunia ketiga tidak pernah meningkat, dan masalah pelunasan hutang luar negeri semakin memberatkan, karena itu surplus impor yang ditunjang modal asing semakin merosot, dan pengalihan sumber-sumber di luar impor yang didasarkan pada ekspor menjadi relatif tidak penting bagi sebagian besar negara dunia ketiga. Selama kendala devisa ini tidak bisa diatasi, negara kurang maju tidak dapat memenuhi kebutuhan impornya bagi program pembangunan.

Akibatnya negara dunia ketiga itu terpaksa menempuh salah satu atau gabungan dari kebijaksanaan berikut ini: mengurangi laju pembangunan negara, mengembangkan ekspor dan melakukan substitusi impor untuk memperbaiki *term of trade*, atau merangsang arus bantuan luar negeri lebih besar lagi. (Atmadja, 2000).

Akibat semakin banyaknya negara-negara yang terjerumus dalam krisis hutang luar negeri, menyebabkan IMF dan Bank Dunia terpaksa menganjurkan kepada negara-negara tersebut untuk melakukan program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) terhadap perekonomian dalam negeri, misalkan dengan pengurangan atau penghapusan berbagai macam subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok lainnya; penundaan kenaikan gaji pegawai negeri; dan berbagai macam kebijaksanaan kontraksi fiskal lainnya, sebagai syarat utama untuk mendapatkan pengurangan hutang atau memperoleh pinjaman baru. Hal ini terjadi pula di Indonesia.(Atmadja, 2000). Secara sederhana, negara tidak lagi mempunyai kebebasan dalam mengatur perekonomiannya karena harus mengikuti anjuran-anjuran dari IMF atau Bank Dunia.

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hutang luar negeri akan menjadi *boomerang* ketika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dalam beberapa hal, kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Islam. Implikasinya adalah bahwa pemerintah perlu sebuah tinjauan kembali mengenai hutang luar negeri agar lebih sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang mana lebih mengedepankan sisi maslahat.

Daftar Pustaka

- Atmadja, Atwin Surya. 2000. "Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000*: 83 - 94. Diakses Tanggal 20 Januari 2018.
- Harahap, Nursapia. 2014. "Studi Kepustakaan". *Jurnal Iqra' Volume 08 No.01 Mei, 2014*. Diakses tanggal 3 Februari 2018.
- Huda, Nurul. 2016. *Keuangan Publik Islami, pendekatan teoritis dan sejarah*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 2017. *Statistika Hutang Luar Negeri Indonesia*, volume VIII Agustus 2017.

Setiawan, Achma Hendra. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Yuliadi, Imamuddin. 2016. "Analisis Hhutang Luar Negeri Indonesia , Pendekatan Keseimbangan Makroekonomi". *Ekuitas Vol.11 No.4 Desember 2007: 535 – 551*. Diakses Tanggal 20 Februari 2018.